

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Potret politik dan demokrasi di Indonesia setelah reformasi mulai bergerak ke arah proses konsolidasi demokrasi. Proses transisi tersebut diperkuat dengan mekanisme elektoral yang tepat melalui Pemilihan Umum (Pemilu) secara langsung. Dalam negara demokrasi, Pemilu dianggap sebagai lambang dan menjadi tolak ukur dari tingkat partisipasi politik. Pelaksanaan Pemilu dengan kebebasan berpendapat, berserikat, dianggap mencerminkan dengan akurat partisipasi aspirasi dari masyarakat (Budiardjo, 2008). Pelaksanaan Pemilu diartikan sebagai sarana masyarakat agar dapat menyatakan kedaulatannya. Paham kedaulatan rakyat menjelaskan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi suatu negara adalah rakyat. Rakyat yang menentukan bagaimana cara dan corak pemerintahan diselenggarakan. Berkaitan dengan Pemilu di Indonesia memiliki dua bentuk sistem Pemilu. Diantaranya, Pemilu legislatif tingkat pusat maupun daerah dan Pemilu eksekutif untuk kepala negara dan kepala daerah.<sup>1</sup>

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa pemilihan kepala daerah adalah sebuah ajang demokrasi dalam rangka

---

<sup>1</sup> Firmanzah (2010) menjelaskan melalui Pemilu rakyat dapat memilih parwakilannya untuk dapat duduk di parlemen dan struktur pemerintahan. Aktor politik (calon) harus mampu menunjukkan komunikasi politik yang baik sehingga maksud dan tujuannya sampai kepada masyarakat. Kemudian Pemilu berperan bermacam-macam di setiap negara dengan tujuan yang satu yakni memilih pemimpin. Pemilu biasa digunakan hanya untuk memilih anggota parlemen saja, namun pada sebagian negara Pemilu bertujuan untuk memilih para pejabat tinggi negara.

mencari pemimpin yang sah (Undang-Undang Nomor 23, 2014). Mengingat esensi Pilkada adalah Pemilu yang secara prosedural dan substansial merupakan bentuk manifestasi dari prinsip demokrasi dan penegakan kedaulatan, maka Pilkada mendapatkan pengaturan khusus agar derajat akuntabilitasnya dan kualitas demokratisasinya dapat terpenuhi dengan baik. Terlebih Pilkada sebagai instrumen penting bagi demokratisasi di level lokal atau daerah yang menjadi landasan bagi demokratisasi di tingkat nasional.

Dalam penyelenggaraan Pilkada harus melaksanakan 3 (tiga) fungsi penting untuk mendapatkan substansi yang jelas dalam pelaksanaannya. Pertama, memilih kepala daerah harus sesuai dengan keinginan masyarakat di daerah sehingga ia dapat mewujudkan keinginan masyarakat di daerah. Kedua, dengan dilaksanakannya Pilkada diharapkan pilihan masyarakat di daerah berdasarkan visi, misi, program serta kualitas dan integritas calon kepala daerah. Ketiga, sebagai sarana pertanggungjawaban sekaligus proses evaluasi dan kontrol publik secara politik terhadap calon kepala daerah dan kekuatan politik yang menopangnya (Janedjri, 2012).

Dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia sangat lazim dijumpai pemanfaatan tim pemenangan di luar partai politik pengusung baik pelaksanaan Pemilu eksekutif maupun legislatif (Aspinall & Sukmajati, 2015). Tim pemenangan biasa diartikan sebagai tim yang bertujuan untuk membantu kandidat dalam memenangkan Pemilu dengan cara mencarikan suara pemilih untuk kandidat. Dalam sehari-hari

masyarakat biasa menyebut dengan tim sukses<sup>2</sup>, yang mana sekelompok orang yang bertugas untuk memperjuangkan calon yang diusung agar berhasil dalam meraih kemenangan pada suatu pemilihan. Disamping tim sukses terdapat jaringan dari luar partai politik yang biasa disebut sebagai broker<sup>3</sup>, berfungsi sebagai perantara antar kandidat dengan pemilih sehingga pendistribusian sumberdaya dapat merata (Noor, 2016).

Secara bahasa broker menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pedagang perantara yang menghubungkan pedagang satu dengan pedagang yang lainnya dalam hal jual beli. Selain itu broker juga diartikan sebagai penghubung, yang mana dalam bahasan ilmu politik broker menjadi bahasan yang menarik karena sering dikaitkan dengan pola patronase dan klientalisme atau bagaimana hubungan antara patron dan klien, broker terletak antara patron dan klien tersebut karena broker merupakan pihak ketiga (Harjanto, 2012). Sehingga dapat peneliti definisikan broker sebagai pihak ketiga yang menghubungkan antara pihak pertama dan pihak kedua, dimana broker memiliki peran penting di antara

---

<sup>2</sup> Tim sukses merupakan metode pengorganisasian kampanye Pemilu yang khas terbentuk setelah Pemilu pertama pasca-Suharto di Indonesia setelah tahun 1999. Hampir setiap kandidat yang serius ingin memenangkan kursi legislatif di tingkat manapun atau yang ingin terpilih sebagai kepala daerah (provinsi atau kabupaten) akan membentuk tim tersebut. Tim sukses biasanya terdiri dari rekan-rekan kandidat, termasuk anggota partai, kerabat dekat, teman, dan rekan bisnis. Biasanya terdapat struktur piramida misalnya, calon bupati/walikota membentuk tim sukses puncak di tingkat kabupaten, dengan lebih lanjut sub tim atau koordinator individu di setiap kecamatan. Kemudian merekrut dan mengelola jaringan dari kecamatan sampai ke desa. Koordinator desa merekrut broker akar rumput (relawan) istilah yang biasa digunakan (Aspinall, 2014).

<sup>3</sup> Archer, R. P (1990) menjelaskan sejarah broker dan politik sudah dikenal oleh kalangan dunia pada saat pemilihan kepala daerah secara langsung dilaksanakan. Broker sebagai gambaran awal dari transisi tradisional menuju perilaku broker yang bertujuan untuk meraih keuntungan dan menghidupi mereka. Ia menegaskan bahwa broker dan klientalisme yang terjadi di Colombia merupakan orang-orang yang berasal dari desa dan masih berperilaku tradisional. Dimana mereka bertindak sebagai broker dengan tujuan mendapatkan keuntungan secara materi dari jasa yang diberikan kepada calon.

kedua pihak tersebut dan memiliki *resource* yang dijadikan sebagai daya jual sebagai broker.

Broker politik sudah mulai dikenal di kalangan dunia pada saat pemilihan kepala daerah secara langsung dilaksanakan.<sup>4</sup> Aspinall dan Sukmajati (2015) menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang melatarbelakangi mengapa posisi broker sangat vital dalam menghubungkan kandidat dan politisi. Kandidat memahami bahwa tidak mungkin dapat berinteraksi secara langsung dengan pemilih dengan jumlah pemilih yang sangat banyak. Hal tersebut membuat kandidat membutuhkan agen (penghubung) yang bekerja dan bergerak atas nama mereka untuk dapat mengorganisir dukungan dari akar rumput. Kemudian Susan Stokes dalam (Aspinall, 2014) menjelaskan kandidat tidak memiliki pilihan lain selain bergantung pada broker lokal yang dekat dengan pemilih di daerah pemilihan tersebut.

Di Indonesia broker mulai masuk dalam ranah politik pada awal Pemilu mulai dilaksanakan. Broker mulai masuk dalam politik Indonesia dan berkembang pada saat reformasi mulai berkejolak, dengan berkejolaknya reformasi nilai-nilai demokrasi kembali hidup dengan demikian pemilihan eksekutif, legislatif, dan kepala daerah mulai dilakukan secara langsung dan dipilih oleh rakyat (Aspinall,

---

<sup>4</sup> Fenomena jaringan perantara (broker) di Indonesia bukan merupakan hal yang baru melainkan sudah ada sejak periode Pemilu orde baru. Yang mana keberadaannya berawal dari kendala timbal balik yang dialami kandidat. Melihat selama pemberian-pemberian dari mereka sering mengalami kendala respons balik dari konstituennya, bahkan kebanyakan pemberian materi hanya sekedar interaksi satu kali (*one off interaction*) karena kebanyakan pemilih akan merespons keuntungan yang diperolehnya dengan berbagai cara. Seperti, mereka merasa tidak terikat kewajiban atas pemberian tersebut, atau mereka menganggap pemberian tersebut memang tidak mengingat bagi dirinya. Sehingga dengan kondisi ini para kandidat perlu membentuk jaringan perantara untuk membantu mengatasi ketidakpastian tersebut (Kramon, 2016).

2014).<sup>5</sup> Secara umum broker mampu menyampaikan, memonitor, dan hingga mendesak kepatuhan pemilih. Lebih jauh lagi, peran broker harus mampu memastikan para pemilih untuk cenderung memilih kandidatnya mengingat pemilihan suara bersifat rahasia (Larreguy *et al.*, 2016). Sehingga kandidat yang akan mencalonkan diri sebagai pemimpin menjadi hal mutlak yang harus dibangun adalah menyiapkan tim sukses dan broker untuk meraih kekuasaan.

Kemudian Aspinall dan Sukmajati (2015) menyebutkan terdapat tiga bentuk jaringan broker dalam menjalankan patronase pada Pemilu yaitu: Mesin-mesin jaringan sosial, partai politik, dan tim sukses. Tim sukses merupakan bentuk jaringan broker suara yang paling umum digunakan oleh kandidat. Tim sukses seringkali disebut dengan nama tim kemenangan, tim keluarga, dan tim relawan. Selanjutnya partai politik, memainkan peran yang sangat minim dalam mengorganisir dan kampanye di akar rumput untuk mendukung kandidat. Sehingga pada penelitian ini terfokus pada broker dengan jaringan sosial yang memiliki pengaruh untuk memberikan dukungan bagi kandidat.

Jaringan sosial merupakan sebuah konsep yang dapat dipahami sebagai rangkaian aktor-aktor (*nodes*) dan hubungan-hubungan (*relations*) di antara para aktor-aktor (Wasserman & Faust, 1994).<sup>6</sup> Putnam menjelaskan gagasannya

---

<sup>5</sup> Di Indonesia, masalah loyalitas broker bisa dibilang sangat parah karena sifat organisasi yang sangat cair dan informal yang didirikan para kandidat untuk membantu mereka memenangkan pemilihan. Organisasi-organisasi yang biasa disebut tim sukses ini merupakan jaringan broker politik yang bisa melibatkan berbagai tokoh masyarakat, pengusaha, aktivis, pemuka agama, dan sejenisnya (Aspinall, 2014).

<sup>6</sup> Wasserman & Faust (1994) menyebutkan terdapat tujuh konsep utama dalam analisis jaringan sosial, aktor-aktor, dapat berupa individu, korporasi, atau unit sosial secara kolektif; Pertama ikatan relasi, yaitu aktor-aktor dihubungkan dengan ikatan sosial; Kedua dyad, yaitu ikatan antara dua aktor atau kelompok yang terdiri dari dua orang yang mana terdapat aktifitas untuk mendiskusikan persoalan-persoalan menyelesaikan tugas; Ketiga triad, merupakan hubungan antara sekumpulan aktor yang lebih besar; Keempat sub kelompok, pasangan aktor yang terkait dalam ikatan satu sama

mengenai modal sosial bahwa jaringan sosial memiliki nilai, kontak sosial memengaruhi produktivitas individu dan kelompok. Hal tersebut merujuk pada hubungan antar individu dan jaringan sosial dan norma resiprositas dan kepercayaan yang tumbuh dari hubungan-hubungan tersebut. Sehingga diperlukan ikatan atau jaringan sosial yang ada dalam masyarakat untuk mendorong produktivitas (John, 2018).

Jaringan sosial tidak hanya beranggotakan pada satu individu, melainkan berupa sekumpulan orang yang mewakili titik-titik, satu titik mewakili satu orang misalnya organisasi, instansi, pemerintah atau negara. Jaringan sosial berkaitan dengan hubungan yang dilakukan oleh satu individu dengan individu lainnya sehingga adanya hubungan yang terbangun antara individu tersebut. Hubungan yang terjadi bisa dalam bentuk formal maupun informal. Hubungan ini merupakan gambaran atau cerminan dari kerjasama dan koordinasi antar warga yang didasari oleh ikatan sosial yang aktif dan bersifat resiprosikal (Damsar, 2002). Jaringan tersebut terbentuk antara satu individu dengan individu lain yang akan berkembang sesuai dengan keberadaan dan hal yang dilakukan oleh individu sehingga berpengaruh terhadap elektabilitas seseorang (kandidat).

Para kandidat seringkali mendapatkan dukungan dari tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh. Dengan harapan, para tokoh ini mampu mengarahkan jaringan sosial yang dimilikinya dalam memberikan dukungan bagi kandidat.

Tokoh masyarakat biasanya memiliki jaringan formal dalam institusi pemerintah,

---

lain; Kelima kelompok, merupakan kumpulan dari aktor-aktor yang ikatannya dapat diukur secara teoritis, empiris dan konseptual; Keenam relasi, ikatan dari jenis yang khusus antara anggota suatu kelompok; Ketujuh jaringan sosial, sekumpulan aktor dan relasi dan relasi yang didefinisikan oleh aktor-aktor terkait (Wasserman & Faust, 1994).

misalnya, pada unit-unit pemerintah terendah seperti kepala desa, kepala dukuh, RT, RW, atau pemimpin dari asosiasi formal seperti, kelompok keagamaan, organisasi etnis, dan klub-klub olahraga. Tokoh masyarakat juga bisa berasal dari tokoh informal misalnya, tokoh-tokoh keagamaan, para tetua desa, ketua-ketua kekerabatan dan orang yang dianggap penting dalam komunitasnya (Aspinall & Sukmajati, 2015).

Dengan memanfaatkan tokoh-tokoh ini, para kandidat berharap mereka bisa mendorong para pengikutnya untuk mendukung kandidat tersebut.<sup>7</sup> Dalam hal ini, kandidat seringkali memanfaatkan jaringan sosial yang telah ada. Mereka memanfaatkan kepercayaan sosial (*social trust*) yang ada dalam suatu jaringan untuk mendapatkan dukungan politik. Aspinall dan Sukmajati (2015) menyebutkan, kadangkala para kandidat juga merekrut tokoh masyarakat untuk masuk ke dalam struktur tim sukses. Kandidat juga memasukkan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh lebih dari satu komunitas atau desa yang mana hal ini tidak sesuai dengan format tim sukses yang ada.

Untuk memetakan peranan broker berdasarkan fungsi dan tujuan, Aspinall merincikan broker ke dalam tiga bagian untuk menjelaskan fungsi dari masing-masing bagian tersebut; (a) broker aktivis, mendukung kandidat berdasarkan politik, etnis, agama, atau komitmen lainnya. Broker dalam kategori ini menjelaskan bahwa mereka sebagai broker menggunakan apa yang mereka miliki

---

<sup>7</sup> Di negara Thailand terdapat broker dalam ekonomi politik yang dikenal dengan *chao pho*. Dalam kontestasi politik, *chao pho* memiliki jaringan yang kuat terkhusus dalam jajaran elit lokal yang disegani karena memiliki kemampuan mengendalikan masyarakat melalui aparat koersifnya. Dalam hal ini, posisi *chao pho* yang strategis karena pengaruh dan pengikut yang dimilikinya, tidak jarang membuat elit politik yang mengikuti kontestasi politik meminta bantuan mereka dalam memobilisasi massa dengan imbalan tertentu (Agustino & Yusof, 2010).

untuk mempengaruhi orang lain; (b) broker klientelis, menginginkan hubungan jangka panjang dengan kandidat atau dengan broker yang lebih senior, dengan tujuan menerima imbalan di masa depan. Broker dalam kategori ini biasanya lebih loyal kepada atasannya karena ada yang diharapkan oleh broker dalam masa jangka panjang; (c) broker oportunistis, mencari keuntungan pendek selama masa kampanye. Broker ini hanya bekerja pada masa kampanye dan setelah itu mereka tidak ikut campur terhadap pengguna jasa mereka (Aspinall, 2014).

Penelitian terkait broker selalu menjadi ketertarikan tersendiri dalam dunia penelitian. Beberapa penelitian terdahulu mengkaji bagaimana tentang perkembangan broker serta peranan broker dalam memenangkan kandidat pada pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Beberapa penelitian tersebut seperti; penelitian dari; Fauziah Harnom *et al.*, 2019; Dicky Rizki Koara *et al.*, 2021; Olga Dara Monica, 2020; Gede Ari Pratama Putra *et al.*, 2022. Pada dasarnya, beberapa penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui peranan broker yang merupakan salah satu faktor untuk memperoleh dukungan dari masyarakat. Menariknya, broker sebagai pihak ketiga penghubung antara kandidat sebagai puncak piramida dengan masyarakat pemilih di bawah memiliki kekuatan dan pengaruh besar di masyarakat lokal yang dapat menggiring opini masyarakat untuk kandidat yang mereka bantu, dan broker meminta imbalan atas jasa yang mereka lakukan tersebut.

Hal ini digambarkan oleh penelitian dari Koara *et al.*, (2021) bagaimana peran reje kampung (kepala desa) mampu mempengaruhi masyarakat di desanya untuk memenangkan salah satu Caleg pilihannya. Selain itu, figur reje kampung yang memiliki pengaruh menjadikan peran broker politik menjadi lancar, dengan



memobilisasi masyarakat menggunakan pendekatan keakraban dan memanfaatkan statusnya sebagai orang yang berpengaruh di wilayahnya.<sup>8</sup> Sejalan dengan penelitian sebelumnya, penelitian dari Asmawati *et al.*, (2021) kiai yang memiliki modal sosial sebagai broker suara mampu memobilisasi massa yang menarik perhatian bos politik pada kontestasi Pilkada. Kiai dengan religiusnya berperan sebagai perantara dalam menyampaikan materi kepada pemilih yang dituju.<sup>9</sup>

Selaras dengan penelitian peneliti, Menurut Monica tim sukses, tokoh masyarakat adalah broker politik yang terlibat dalam kemenangan Jefri Masrul dalam Pileg 2019. Tim sukses dan relawan lebih cenderung kepada broker oportunist. Sedangkan ketua tim sukses termasuk kepada broker klientelis karena menginginkan hubungan jangka panjang dengan kandidat atau dikenal sebagai broker senior, dengan tujuan menerima hadiah di masa depan (Monica, 2020). Selanjutnya Radiallah menyebutkan koordinator relawan RT dan kelurahan dalam kemenangan Fadly Amran dan Asrul dikategorikan sebagai broker oportunist karena mendapatkan keuntungan materi dalam waktu jangka pendek. Kemudian niniak mamak nagari dikategorikan sebagai broker aktivis yang lebih dipercaya dan setia karena adanya faktor hubungan dengan kandidat, seperti hubungan agama, etnis, kedaerahan atau kekeluargaan (Radiallah, 2019).

---

<sup>8</sup> Reje kampung berperan sebagai broker politik untuk membuat Desa Burni Bius berkembang dan menyejahterakan kelompok tani dan UMKM di Desa Burni Bius. Figur reje kampung tersebut sebagai orang yang berpengaruh di wilayahnya membuat peran broker politik berjalan dengan lancar, terbukti dengan memberikan pengaruh yang signifikan pada Pemilu legislatif.

<sup>9</sup> Pada penelitian ini juga menjelaskan bagaimana peran tersebut dianggap tidak etis apabila kiai sebagai tokoh agama memberikan materi bagi pemilih. Kiai yang memiliki citra baik di tengah masyarakat, menjadi salah satu elemen penting dalam kemajuan demokrasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kiai sebagai tokoh agama sangat disegani dan turut andil dalam menata demokrasi dengan baik di masa mendatang.

Berangkat dari beberapa penelitian sebelumnya, penelitian mengenai broker menjadi perhatian menarik bagi peneliti, melihat bagaimana eksistensi broker sangat dibutuhkan kandidat dalam menjangkau pemilih untuk memenangkan pemilihan. Kandidat bergantung kepada broker politik karena memiliki akses dan kontrol informasi terkait pemilih, juga memiliki sumberdaya untuk mengarahkan pemilik suara untuk menentukan pilihan politiknya. Broker politik salah satunya berasal dari jaringan sosial yang dimiliki kandidat yakni tokoh masyarakat yang berpengaruh. Seperti yang disampaikan oleh Seven Boy selaku sekretaris tim pemenang Hamsuardi Risnawanto dalam memanfaatkan eksistensi jaringan sosial dalam memanfaatkan pemilih:

“Kami mengembangkan beberapa jaringan pada Pilkada tersebut, misal di bidang olahraga volly karena beliau *basic* olahraganya volly. Atlet-atlet pemain volly kita bentuk jaringan khusus untuk kemenangan beliau. Kemudian jaringan adat, niniak mamak. Kebetulan situasi di Pasaman Barat terdapat dualisme daulat (raja), ada yang pro pemerintah dan ada yang kontra pemerintah. Seperti ketika pemerintahan Pak Yulianto, daulatnya adalah Hendri Eka Putra. Jailani termasuk raja yang tidak pro ke pemerintah saat itu, kemudian itu yang di rangkul Pak Hamsuardi dan Risnawanto. Jailani juga diakui oleh kaumnya sebagai pucuk adat dan sudah dinobatkan. Mereka mengerahkan massa di tingkat adat juga, mengadakan pertemuan-pertemuan di balerong adat, atau di rumah niniak mamak yang sealiran dengan dia, juga mengajak anak kemenakannya.” (Wawancara bersama Seven Boy, 06 Juni 2022).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dilihat bahwasanya terdapat jaringan sosial yang secara masif telah dibangun sejak lama hingga pelaksanaan kampanye. Hal tersebut bertujuan untuk mengakomodir pemilih pada pelaksanaan Pilkada. Kemudian pendekatan dengan tokoh masyarakat Jawa juga dilakukan oleh pasangan Hamsuardi dan Risnawanto, seperti yang disampaikan oleh Supriyono selaku tokoh masyarakat Jawa:

“Dia mengunjungi saya dan mengunjungi tokoh-tokoh Jawa lainnya. Dalam adat Jawa, seorang tokoh masih cukup dihormati. Pilihan tokoh menjadi referensi dari masyarakat Jawa. Meskipun tokoh adat ini merupakan tokoh yang informal dan kita masyarakat Jawa termasuk etnis yang minoritas di Pasaman Barat, tetapi kita dominan sama dalam referensi politik dan tidak terpecah belah.” (Wawancara bersama Supriyono, 10 Mei 2023).

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa tokoh masyarakat Jawa memiliki *bargaining position* di tengah masyarakat. Oleh karenanya pasangan Hamsuardi dan Risnawanto mendatangi tokoh-tokoh tersebut untuk mendapatkan perhatian masyarakat. Bagi masyarakat Jawa, tokoh yang dituakan dihormati dan bisa menjadi preferensi politik bagi masyarakat. Hal tersebut yang melatarbelakangi penelitian ini dengan melihat bagaimana jaringan sosial dari pasangan calon ini bekerja untuk mengamankan suara pemilih pada Pilkada. Stokes *et al.*, (2013) menyebutkan makelar suara atau broker dipekerjakan dengan alasan mereka mengenal baik para pemilih. Kemudian ditambahkan oleh Abbiyyu (2020) peran utama broker adalah membeli suara dan memobilisasi massa.

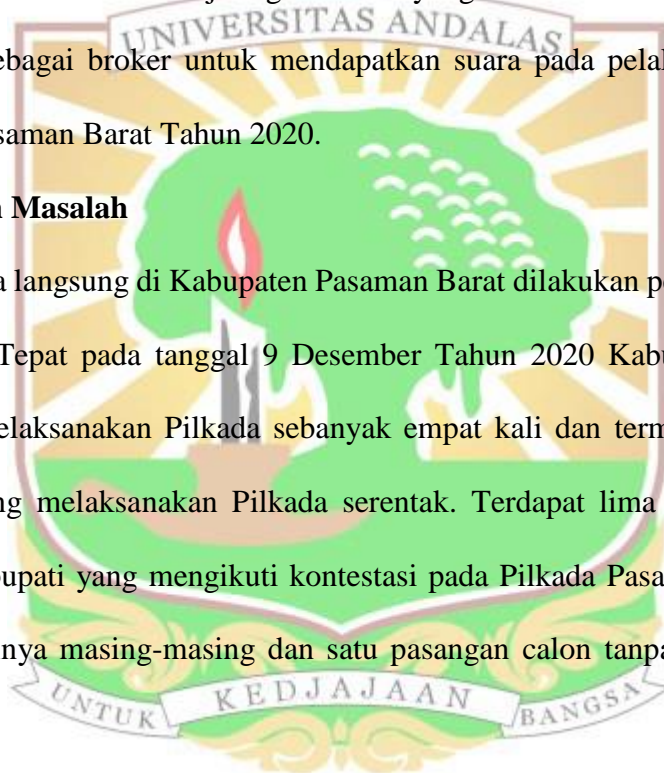
Pada beberapa penelitian sebelumnya, belum secara spesifik dan mendalam membahas eksistensi broker politik dari mesin jaringan sosial yang dimiliki kandidat. Penelitian terdahulu hanya membahas mengenai peranan broker yang terbentuk dan bekerja pada pelaksanaan Pilkada sedangkan penelitian ini melihat hubungan broker dari mesin jaringan sosial yang telah dibangun dan dirawat sejak lama. Serta melihat loyalitas broker dan *political cost* yang digunakan sangat minim dengan memanfaatkan broker dari mesin jaringan sosial tersebut. Banyak literasi menyatakan bahwa mobilisasi massa tidak lagi terfokus pada partai politik (Tawakkal, 2017). Menimbang keberadaan partai politik dinilai tidak efektif dalam

proses mobilisasi massa sehingga pemanfaatan tokoh formal dan informal dari mesin jaringan sosial dinilai lebih efektif.

Hal tersebut memaksa kandidat yang mencalonkan diri sebagai pemimpin mutlak menjalin hubungan dengan orang-orang formal dan informal di luar partai politik dan tim sukses resmi yang mengantarkan mereka menuju kursi kekuasaan. Oleh karena itu pada penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai keterlibatan mesin jaringan sosial yang dimiliki oleh Hamsuardi dan Risnawanto sebagai broker untuk mendapatkan suara pada pelaksanaan Pilkada Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020.

## 1.2 Rumusan Masalah

Pilkada langsung di Kabupaten Pasaman Barat dilakukan pertama kali pada Tahun 2005. Tepat pada tanggal 9 Desember Tahun 2020 Kabupaten Pasaman Barat telah melaksanakan Pilkada sebanyak empat kali dan termasuk salah satu kabupaten yang melaksanakan Pilkada serentak. Terdapat lima pasangan calon bupati/wakil bupati yang mengikuti kontestasi pada Pilkada Pasaman Barat yang diusung partainya masing-masing dan satu pasangan calon tanpa diusung partai (independen).



**Tabel 1.1**  
**Partai Politik Pengusung Calon Bupati dan Wakil Bupati**

<b>No.</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Partai Pengusung</b>
-	<b>Hamsuardi-Risnawanto</b>	<b>PKS, PDIP, PAN</b>
-	Maryanto-Yulisman	Gerindra, PBB
-	Erick Hariyona-Syawal	Golkar, PPP, Perindo, PKB
-	Yulianto-Syafrial	Demokrat, Nasdem
-	Agus Susanto-Rommy Candra	Independen

*Sumber: Data Sekunder KPU Pasaman Barat*

Seluruh pasangan calon menyampaikan gagasan, visi dan misi sebagai bupati dan wakil bupati Pasaman Barat. Berbagai bentuk tawaran serta kontrak sosial yang disampaikan masing-masing calon sehingga masyarakat memiliki pertimbangan dalam memilih mereka pada saat pemungutan suara. Dari hasil pemungutan suara Pilkada tersebut, menghasilkan pasangan Hamsuardi-Risnawanto sebagai pemenang kontestasi politik dengan selisih suara tipis dari petahana Yulianto dan Syafrial.<sup>10</sup> Berikut perolehan suara masing-masing pasangan calon:

**Tabel 1.2**  
**Perolehan Suara Pilkada Pasaman Barat Tahun 2020**

No	Nama Pasangan	Perolehan Suara	Persentase
1.	<b>Hamsuardi-Risnawanto</b>	<b>56.555</b>	<b>31.5%</b>
2.	Maryanto-Yulisman	19.696	11.0%
3.	Erick Hariyona-Syawal	26.406	14.7%
4.	Yulianto-Syafrial	52.490	29.2%
5.	Agus Susanto-Rommy Candra	24.469	13.6%

*Sumber: Data Sekunder KPU Pasaman Barat*

Berdasarkan tabel 1.2 hasil perolehan Pilkada serentak Pasaman Barat Tahun 2020 dapat diketahui bahwa pasangan Hamsuardi dan Risnawanto memperoleh suara terbanyak sebesar 56.555 suara atau 31.5% jumlah suara sah, dan ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati terpilih. Disusul perolehan suara terbanyak kedua yaitu pasangan Yulianto dan Syafrial dengan perolehan sebanyak 52.490 suara atau 29.2% suara sah. Ketiga pasangan Erick Hariyona dan Syawal dengan perolehan suara 26.406 suara atau 14.7% suara sah. Keempat pasangan Agus Susanto dan Rommy Candra dengan perolehan suara 24.469 atau 13.6% suara

<sup>10</sup> Yulianto merupakan wakil bupati Pasaman Barat yang berpasangan dengan Syahiran pada tahun 2015. Kemudian Syahiran meninggal dunia pada tahun 2019, kemudian Yulianto menggantikan sebagai bupati Pasaman Barat hingga tahun 2020.

sah. Dan kelima pasangan Maryanto dan Yulisman dengan perolehan suara 19.696 suara atau 11.0% suara sah.

**Tabel 1.3**  
**Identitas Hamsuardi dan Risnawanto**

<b>Nama</b>	<b>Organisasi dan Pengalaman Profesional</b>
Hamsuardi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atlet Bola Volly PON Sumatera Utara Tahun 1982-1985</li> <li>- Staff PNS Pasaman Tahun 1986</li> <li>- Lurah Pasaman Tahun 1989-1995</li> <li>- Camat Lubuk Sikaping Tahun 1999-2001</li> <li>- Camat Pasaman Tahun 2001-2003</li> <li>- Kepala Bidang Kehutanan Pasaman Tahun 2004-2006</li> <li>- Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pasaman Barat Tahun 2006-2010</li> <li>- Ikatan Remaja Muhammadiyah Tahun 1980-1981</li> <li>- Pemuda Pancasila Pasaman Tahun 1992</li> <li>- Pengurus KNPI Pasaman Tahun 1993-1996</li> <li>- Sekretaris KONI Pasaman Tahun 1998-2003</li> <li>- Manajer Tim Sepakbola Pasaman Barat Divisi II Tahun 2007</li> </ul>
Risnawanto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua PBVSI Pasaman Barat Tahun 2016-2018</li> <li>- Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2005-2010</li> <li>- Anggota DPRD Pasaman Barat Tahun 2014-2015</li> <li>- Ketua KONI Pasaman Barat Tahun 2005-2010</li> <li>- Ketua Gapensi Pasaman Barat Tahun 2004-2008</li> <li>- Ketua Gapensi Pasaman Barat Tahun 2008-2012</li> <li>- Ketua FKPPi Pasaman Barat Tahun 2016-2020</li> <li>- Ketua DPC PDIP Pasaman Barat Tahun 2005-2015</li> </ul>

*Data diolah dari beberapa sumber Tahun 2023*

Kemenangan Hamsuardi dan Risnawanto merupakan fenomena yang cukup menarik, dapat dilihat pada tabel 1.3 mengenai latar belakang organisasi dan pengalaman profesional, Hamsuardi dan Risnawanto merupakan tokoh politik dan pemerintahan yang telah berkarir di Kabupaten Pasaman Barat. Menariknya penelitian ini adalah melihat bagaimana Hamsuardi yang telah tiga kali mencalonkan diri pada pelaksanaan Pemilu; Pertama, Pilkada Pasaman Barat

Tahun 2015 sebagai calon Bupati berpasangan dengan Kartuni sebagai wakil; Kedua, Pemilihan legislatif DPR RI tahun 2019; Ketiga, Pilkada serentak Tahun 2020. Pada pencalonan yang ketiga barulah ia terpilih dan ditetapkan sebagai Bupati Pasaman Barat.

Berbeda hal dengan Hamsuardi, Risnawanto yang memiliki *track record* di ranah politik pernah menjadi Wakil Bupati Pasaman Barat berpasangan dengan Syahiran yang terpilih pada Tahun 2005. Serta menjadi anggota DPRD Pasaman Barat pada Tahun 2014. Disamping itu, ia juga mencalonkan diri sebagai Bupati berpasangan dengan Nofrizal sebagai wakil pada Pilkada Pasaman Barat Tahun 2010. Juga mencalonkan diri sebagai wakil Bupati berpasangan dengan Zulkenedi Said sebagai Bupati pada Tahun 2015. Pada tahun 2020 kembali mencalonkan diri sebagai wakil bupati berpasangan dengan Hamsuardi hingga ditetapkan sebagai wakil bupati terpilih.

Peneliti melihat pengalaman karir Hamsuardi di pemerintahan lebih banyak di bidang olahraga dapat membangun relasi dan jaringan sosialnya dengan tokoh masyarakat, dimana jaringan tersebut telah lama ia bangun. Hal ini disampaikan langsung oleh Hamsuardi:

“Jaringan yang kita bangun banyak, ada jaringan olahraga, kelompok agama, kelompok sosial, kemudian kelompok tani, dan masyarakat. Dari jaringan tersebut, tokoh masyarakat dan olahraga sudah lama kita bangun.” (Wawancara bersama Hamsuardi, 24 Juni 2022).

Peneliti menilai jaringan sosial yang dibangun oleh Hamsuardi merupakan dampak dari pengalaman ia berkarir. Hal tersebut memudahkan ia untuk dekat dengan sejumlah tokoh masyarakat dan niniak mamak. Pada pelaksanaan Pilkada, niniak mamak sangat dibutuhkan untuk mengamankan suara suatu kaum.

Kedekatan dengan jaringan sosial tersebut tentu memudahkan pasangan kandidat mengamankan suara dalam daerah tertentu karena telah memiliki basis masa yang jelas. Kedekatan Hamsuardi dan Risnawanto dengan tokoh masyarakat disampaikan langsung oleh Endalisman selaku Datuak Nagari Kajai:

*“Kedekatan ambo tu emang dari lamo, kalau Hamsuardi inyo kenal jo masyarakat dari dulu. Dek inyo alah mancalon yang katigo. Inyo dakek jo masyarakat mulai dari aka rumpuik. Dari dulu dek kedekatannyo alah masuk ka nagari-nagari, niniak mamak, cadiak pandai dan pemuda. Babeda dengan Risnawanto yang emang berkarir di politik. Inyo panah jadi ketua Partai PDI, panah pulo jadi wakil bupati sebelum e, dan panah juo jadi anggota DPRD Pasaman Barat saperiode jo ambo.”* (Wawancara bersama Endalisman, 31 Mei 2022).

*“Kedekatan saya sudah dari lama, Hamsuardi ia kenal dengan masyarakat dari dulu. Karena ia pernah mencalonkan diri yang ketiga kali. Ia dekat dengan masyarakat mulai dari akar rumput. Dari dulu kedekatannya sudah masuk ke nagari-nagari, niniak mamak, cadiak pandai, dan pemuda. berbeda dengan Risnawanto yang memang berkarir di politik. Ia pernah jadi ketua Partai PDI, sebelumnya juga jadi wakil bupati, dan juga pernah jadi anggota DPRD Pasaman Barat satu periode dengan saya.”* (Wawancara bersama Endalisman, 31 Mei 2022).

Peneliti menilai pendekatan Hamsuardi dan Risnawanto dengan niniak mamak yang memiliki jaringan sosial dengan masyarakat akan memudahkan bagi mereka untuk masuk ke daerah-daerah. Hal tersebut dengan cara memanfaatkan jaringan sosial yang dimiliki pasangan calon untuk mendekati diri dengan niniak mamak atau datuak<sup>11</sup> di suatu kaum. Seperti kedekatan yang dimiliki oleh Risnawanto dengan Datuak Endah karena pernah satu partai dan sama-sama menduduki jabatan di legislatif. Peranan datuak tersebut memberikan pengaruh

---

<sup>11</sup> Niniak mamak atau datuak adalah seorang pemimpin informal/pemuka adat di Minangkabau yang memiliki peranan cukup besar di bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya. Baik di lingkungan persukuannya selaku kepala suku maupun di lingkungan nagarinya, yang mana diwadahi dalam lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN).



dengan ketokohanannya di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Seven Boy selaku sekretaris tim pemenang:

“Pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat tentu dilakukan, ada beberapa tokoh masyarakat yang kita dekati. Beberapa tokoh masyarakat mulai dari datuak sampai Ketua Wirid Yassin Pasaman Barat seperti Inyik Baharuddin mantan bupati sebelumnya.” (Wawancara bersama Seven Boy, 6 Juni 2022).



**Gambar 1.1**

**Hamsuardi dan Baharuddin Melakukan Kampanye**

*Sumber: Data Sekunder Facebook M. Fauzi Yusro*

Kedekatan dengan tokoh masyarakat juga dimanfaatkan oleh Hamsuardi dan Risnawanto untuk memperluas jaringan broker yang dimilikinya, sekaligus untuk mendistribusikan sumberdaya kepada pemilih yang berada di bawah kewenangan tokoh masyarakat tersebut, seperti yang disampaikan oleh Jafriman selaku Jorong Katimaha:

“Dalam tiok patamuhan pasti maadoan makan-makan jo tokoh masyarakat satampeh. Ambo ikuik manyampaian ka masyarakat untuak tujuan maju manjadi bupati dan wakil sekaligus memenuhi kebutuhan di nagari. Untuak tokoh masyarakat yang mandukuang inyo umumnya ado di beberapa kecamatan, mode Ustadz Darmasnyah selaku ketua MUI Pasbar, tu ado beberapa datuak dan pengusaha yang terlibat mamangan.” (Wawancara bersama Jafriman, 4 Juni 2022).

“Dalam setiap pertemuan pasti mengadakan makan-makan bersama tokoh masyarakat setempat. Saya ikut menyampaikan ke masyarakat kalau tujuannya menjadi bupati dan wakil bupati, sekaligus untuk memenuhi kebutuhan di nagari. Tokoh masyarakat yang mendukung umumnya ada di beberapa kecamatan, seperti Ustadz Darmasnyah selaku ketua MUI Pasbar, ada juga beberapa datuak dan pengusaha yang terlibat untuk memenangkan.” (Wawancara bersama jafriman, 4 Juni 2022).

Selain niniak mamak (tokoh informal) dan jorong sebagai orang (tokoh formal) asli di daerah juga memanfaatkan jaringan sosial yang dimilikinya untuk menghubungkan kandidat dengan masyarakat, terlebih karena memiliki kedekatan kekeluargaan di daerah tersebut. Niniak mamak yang didefinisikan sebagai broker memiliki posisi yang otonom dalam struktur sukunya tapi juga terikat dengan aturan adat. Niniak mamak tidak memiliki akses langsung terhadap sumberdaya suku akan tetapi memiliki kekuasaan adat untuk memutuskan sesuatu. Sehingga dengan mudah mengakomodir massa untuk merekomendasikan dalam memilih kandidat. Selain itu, kandidat (Hamsuardi) yang dikenal masyarakat sebagai tokoh agamais dimanfaatkan oleh broker dengan cara membentuk ikatan remaja mesjid untuk melakukan *branding* terhadap hal tersebut. Hal ini disampaikan oleh Mahyan selaku Jorong Tamiang:

*“Awak ikuik juo untuak mambantu mengkampanyekan ka warga mode mambagian kalender-kalender ja rumah warga. Selain itu, urang tau jo pak Hamsuardi ko di bidang agama, dek itu ambo mambuek Ikatan Remaja Mesjid (IRMI). Lai datang apak itu ka siko basamo keluarga e, mambantu Masjid Istiqomah dengan balanjo garin tu maagiah Al-Quran.”* (Wawancara bersama Mahyan, 4 Juni 2022).

“Saya ikut juga untuk membantu mengkampanyekan ke warga seperti memberikan kalender-kalender ke rumah warga. Selain itu, orang kenal dengan Bapak Hamsuardi di bidang agama, karena itu saya membuat Ikatan Remaja Mesjid (IRMI). Pernah Bapak Hamsuardi datang ke sini bersama dengan keluarganya, membantu Masjid Istiqomah dengan memberikan belanja garin dan memberikan Al-Quran.” (Wawancara bersama Mahyan, 4 Juni 2022).

Dalam menjangkau pemilih, Hamsuardi dan Risnawanto memanfaatkan sumberdaya yang ada, salah satunya jaringan sosial yang berperan sebagai tokoh formal yaitu jorong. Tokoh formal sebagai broker memperlihatkan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat dengan cara melakukan pendekatan-pendekatan terhadap jaringan yang dimilikinya. Seperti niniak mamak selaku tokoh informal dan da'i pendekatan di bidang keagamaan. Terlebih lagi broker yang bekerja merupakan masyarakat asli daerah tersebut, sehingga memudahkan dalam berinteraksi dan mengakomodir massa untuk memberikan dukungan kepada kandidat.

Di samping itu, pengaruh broker di bidang olahraga menjadi hal yang diperhatikan oleh Hamsuardi dan Risnawanto. Mengingat *track record* yang dimilikinya cukup berpengaruh karena memiliki kedekatan yang telah dibangun sejak lama. Broker jaringan olahraga yang rata-rata pada daerah lingkup kejurongan membentuk hubungan resiprokal dari kandidat dengan masyarakat. Beberapa kegiatan yang dilakukan seperti mengadakan kegiatan-kegiatan pertandingan olahraga dan memberikan bantuan peralatan di bidang olahraga. Hal tersebut disampaikan oleh Endalisman:

*“Hamsuardi pernah menjadi ketua Dispora dan ketua Koni, maagiah pitih untuak tim volly batandiang dan maagiah perlengkapan olahraga. Iko yang mambuek e mudah untuak dakek jo pemuda di daerah yang suko olahraga terutama di daerah Kajai iko.”* (Wawancara bersama Endalisman, 1 Juni 2022).

“Hamsuardi pernah menjadi ketua Dispora dan ketua Koni, kemudian memberikan uang untuk pertandingan volly dan juga perlengkapan olahraga. Hal tersebut yang menjadikan Ia dekat dengan pemuda yang berada di daerah dan suka olahraga terutama di Kajai.” (Wawancara bersama Endalisman, 1 Juni 2022).

Pengaruh yang diberikan oleh tim olahraga kepada lingkungan sekitar terlihat terkhusus di ranah paling kecil yaitu keluarga, pernyataan tersebut disampaikan oleh Liusman selaku ketua tim sukses:

*“Hamsuardi punyo tim volly, tim volly iko biaso e lai di tiok kejongan. Dari tim volly yang lai di tiok kejongan bisa dicaliak bara pulo keluarganyo, kan lumayan juo untuak mamilih Hamsuardi jo Risnawanto.”* (Wawancara bersama Liusman, 1 Juni 2022).

“Hamsuardi memiliki tim volly yang biasanya berada di tiap kejongan. Berdasarkan tim volly yang ada tiap kejongan dapat dilihat berapa keluarga yag ada, lumayan untuk memilih Hamsuardi dan Risnawanto.” (Wawancara bersama Liusman, 1 Juni 2022).



**Gambar 1.2**

**Hamsuardi bersama Atlit Volly Pasaman Barat**

*Sumber: Data Sekunder Facebook Ridho Rizki*

Berdasarkan wawancara dan gambar 1.2 tersebut, peneliti menilai bahwa Hamsuardi dan Risnawanto memanfaatkan jaringan sosial yang dimilikinya sebagai broker, baik jaringan sosial dari tokoh formal dan informal. Broker berperan sebagai penghubung antar kandidat yang berada pada puncak piramida dengan para pemilih yang berada pada level terbawah. Dalam hal ini broker sebagai kekuatan lokal atau individu lokal yang berkuasa mampu memberikan pengaruh dan mendapatkan keuntungan dari orang-orang yang mereka bantu.

Jika dilihat dari rekam jejak Hamsuardi dan Risnawanto di Kabupaten Pasaman Barat, masing-masing telah mengikuti kontestasi Pilkada sejak lama hingga akhirnya terpilih pada Tahun 2020. Untuk menggapai kemenangan tersebut tentu tidaklah mudah, peneliti melihat bahwa terdapat faktor kunci yang membantu memenangkan Hamsuardi dan Risnawanto tersebut. Faktor kunci tersebut adalah jaringan sosial yang dimiliki oleh Hamsuardi dan Risnawanto terkhusus tokoh-tokoh masyarakat, memiliki kekuatan dan *resource* di lingkungannya serta memiliki massa yang jelas sehingga berpotensi menjadi broker. Dimana broker-broker politik tersebut yang membantu Hamsuardi dan Risnawanto pada Pilkada Tahun 2020. Broker ini berperan sentral dalam mengkampanyekan pasangan Hamsuardi dan Risnawanto, kemudian memetakan dan mencegah orang yang berpotensi mengancam popularitas Hamsuardi dan Risnawanto.

Mesin jaringan sosial yang memiliki jumlah massa yang cukup besar sehingga berpotensi sebagai broker. Dalam hal ini jaringan sosial termasuk broker yang dirawat sejak lama, bukan hanya dibutuhkan pada saat pelaksanaan Pilkada. Dengan dirawatnya hubungan baik oleh broker dengan patron (kandidat), broker kepada klien (pemilih) menjadikan broker jaringan sosial sebagai tipe broker yang paling efektif digunakan pada pelaksanaan Pilkada Pasaman Barat. Mengingat masyarakat Pasaman Barat yang multietnis, sehingga kedekatan emosional begitu melekat dengan masing-masing kultur. Dengan demikian diperlukan adanya seseorang perantara (yang dekat dan dikenal oleh masyarakat) untuk menghubungkan kandidat dengan masyarakat dalam mendapatkan dukungan politik.

Sehingga pada penelitian ini, peneliti mencoba menelusuri lebih lanjut mengenai pembagian sekaligus eksistensi broker jaringan sosial Hamsuardi dan Risnawanto. Di mana yang menjadi daya tarik penelitian ini adalah jaringan sosial yang dimiliki kandidat ternyata telah lama dibangun, semenjak mengikuti kontestasi politik pada periode-periode sebelumnya. Peneliti berasumsi besarnya peran serta pengaruh yang diberikan jaringan sosial tersebut di tengah-tengah masyarakat. Dengan menelusuri lebih lanjut mengenai pembagian broker yang disampaikan oleh Aspinall yakni, broker aktivis, broker klientelis, dan broker oportunist. Oleh karenanya, peneliti memandang bahwa dalam pelaksanaan Pilkada Pasaman Barat Tahun 2020, Hamsuardi dan Risnawanto terdapat peran dan eksistensi broker jaringan sosial yang dimilikinya untuk mendapatkan suara masyarakat pada Pilkada.

Broker jaringan sosial Hamsuardi dan Risnawanto memberikan pengaruh dalam meyakinkan pemilih, secara spesifik broker tersebut memiliki kekuatan dan *resource* dalam meyakinkan para pemilih di wilayah kekuasaannya masing-masing. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian broker jaringan sosial Hamsuardi dan Risnawanto Pada Pilkada Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020?
2. Bagaimana eksistensi broker jaringan sosial Hamsuardi dan Risnawanto dalam memenangkan Pilkada Pasaman Barat Tahun 2020?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan masalah penelitian yang telah peneliti paparkan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis pembagian broker jaringan sosial Hamsuardi dan Risnawanto pada Pilkada Pasaman Barat Tahun 2020.
2. Untuk menganalisis eksistensi broker jaringan sosial Hamsuardi dan Risnawanto dalam memenangkan Pilkada Pasaman Barat Tahun 2020.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1.4.1 Teoritis

Hasil penelitian dapat dijadikan sumber relevansi terkait topik broker politik dari kandidat yang lebih spesifik broker politik jaringan sosial. Kemudian sumber informasi yang ada dalam penelitian ini dapat dijadikan bahan dan referensi untuk penelitian selanjutnya, baik digunakan oleh peneliti atau lembaga politik di masa yang akan datang.

#### 1.4.2 Praktis

Mampu mencermati secara kritis tentang peranan broker politik dari jaringan sosial yang dimiliki pasangan calon, melihat jaringan tersebut dengan mudah untuk menggapai pemilih karena telah memiliki basis massa tetap. Sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana peranan broker yang berada di lingkungan sekitar terutama tokoh-tokoh yang menjadi panutan bagi masyarakat di suatu daerah.